

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEMBUANGAN SAMPAH DI  
KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT KECAMATAN  
PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK**

**Oleh:  
CITRA RATNA SARI  
NIM. E42010009**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.  
2014, E-mail : [citra.ratnasari18@yahoo.com](mailto:citra.ratnasari18@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Penulisan skripsi ini diangkat berdasarkan identifikasi fenomena yang terjadi berkaitan dengan implementasi kebijakan dimana implementasi penertiban pembuangan sampah tersebut belum efektif. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban pembuangan sampah di Kelurahan Benua Melayu Laut belum efektif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan efektif. Harus adanya perbaikan dari beberapa faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Untuk itu rekomendasi yang diberikan antara lain sosialisasi lebih giat, penambahan petugas penjaga TPS dan fasilitas armada pengangkut sampah serta perbaikan TPS dan TPA, menindak tegas petugas yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, pertahankan struktur birokrasi yang sudah baik.

**Kata-kata Kunci : implementasi kebijakan, penertiban, sampah.**

**POLICY IMPLEMENTATION IN REGULATING WASTE DISPOSAL AT  
KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT KECAMATAN PONTIANAK  
SELATAN IN PONTIANAK CITY**

by:  
**CITRA RATNA SARI**  
**NIM. E42010009**

**ABSTRACT**

The title of this thesis is taken based on the identification of phenomena which occur regarding to the policy implementation where the implementation of disposal waste's schedule has not yet effective. The purpose of writing this thesis is to know what are the factors which influence the policy implementation in regulating waste disposal in Kelurahan Benua Melayu Laut has not effective yet. This research uses both descriptive and qualitative methods. The conclusion from this research shows that policy implementation has not been effectively running. There should be some improvement in communication, resources, disposition and bureaucratic structures factors in order for policy implementation can run effectively. The recommendations given are more socialization, additional of TPS and improving the carrier's fleet of garbage and improving TPS and TPA, to act firmly officer who do not fulfill well, keep the bureaucratic structure that is good.

**Keywords: policy implementation, regulating, waste.**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi pokok bagi Pemerintah termasuk Pemerintah Kota. Untuk menjalankan peranan penting dalam manajemen Pemerintahan Kota tersebut, tentunya diperlukan adanya sinergisitas dari berbagai pihak terutama dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan secara langsung dengan masyarakat misalnya masalah lingkungan yang didalamnya termasuk permasalahan pengelolaan sampah.

Sampah adalah salah satu faktor yang menyebabkan kota jauh dari kata bersih dan sehat. Sampah yang belum dikelola dengan baik hanya menyebabkan kawasan kota menjadi kotor. "Sampah domestik yang tidak tertangani dengan baik akan berdampak kepada kesehatan manusia, kondisi ekonomi dan tingginya biaya pengelolaan atau perbaikan lingkungan dan infrastruktur atau menimbulkan biaya eksternalitas" (Suparmoko, 2000:1-3).

Cara pandang masyarakat selaku penghasil sampah terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan juga patut dipertanyakan, dalam hal ini telah menjadi masalah psikologi sosial dan perilaku menyimpang masyarakat kota, bahwa citra dan cita-cita kebersihan dan kesehatan lingkungan hanya berlaku bagi wilayah privat dan bukan wilayah publik. Masyarakat tampaknya hanya peduli dengan kebersihan rumahnya saja dan tidak peduli lingkungan sekitarnya sehingga tak jarang ada masyarakat tanpa merasa dosa yang membuang buntalan sampahnya ke wilayah hutan kota, sungai, laut bahkan kebun atau tanah kosong. Ironisnya, fasilitas pengelolaan sampah hampir semua kota di Indonesia masih terbatas. Hal inilah yang melatarbelakangi pemerintah menerbitkan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur tentang tugas dan wewenang pemerintah Kabupaten/Kota serta hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah. Untuk melaksanakan Undang-Undang ini diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah ini berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Berkaitan dengan pengelolaan sampah Pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 yang sudah mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum. Perda ini mencakup beberapa bidang, yaitu : tertib kebersihan, tertib bangunan dan usaha, tertib lingkungan, tertib sungai, parit dan saluran, tertib parkir dan angkutan jalan raya, tertib usaha tertentu, dan tertib sosial. Pengelolaan sampah sendiri merupakan bagian dari tertib kebersihan, seperti yang dibahas dalam pasal 5 ayat 1 dan 2.

Dalam ayat (1) disebutkan "pengangkutan sampah, dalam suatu persil misalnya bekas bongkaran rumah, tanah, tebangan pohon-pohon, limbah dari perusahaan dan sebagainya yang bersifat sampah, dilakukan oleh Dinas Kebersihan atau Badan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan dipungut bayaran, atau diangkut sendiri dengan membuangnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang

lokasinya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.”

Dalam ayat (2) disebutkan “dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan syarat-syarat pengambilan sampah oleh Pemerintah Daerah yakni :

- a. Sampah yang diangkut oleh Pemerintah Daerah ialah sampah di jalan-jalan atau pasar-pasar yang ada tempat pembuangan sampahnya (TPS);
- b. Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu sesuai dengan jadwal pengangkutan yang diatur oleh instansi teknis;
- c. Sampah yang ada di rumah-rumah di dalam gang dibuang ketempat pembuangan sampah yang telah ditentukan dengan syarat dikemas/dibungkus dengan rapi dalam kantong plastik atau lain sebagainya agar tidak berserakan atau menimbunnya dihalaman sepanjang tidak mengganggu tetangga di sekelilingnya;
- d. Setiap warga kota diwajibkan mematuhi jadwal pembuangan sampah di TPS menurut waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah;
- e. Setiap warga Kota Pontianak diwajibkan membayar retribusi kebersihan yang tarifnya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.”

Sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah, Walikota Pontianak mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2006 Tentang jadwal Pembuangan Sampah. Sampai saat ini belum ada perubahan dari Peraturan Walikota tersebut. Seperti yang dibahas pada BAB II Pasal 2 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang harus membuang sampah di tempat-tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Sampah dari rumah tangga dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dengan Syarat dikemas/dibungkus dengan rapi dalam kantong plastik atau lain sebagainya agar tidak berserakan;
- (3) Khusus sampah yang berasal dari bongkaran bangunan dan barang kadaluarsa, harus dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir;
- (4) Pembuangan sampah dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan mulai dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB.

Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, volume sampah perhari untuk di Kota Pontianak adalah 4780,36 m<sup>3</sup>/hari, sedangkan untuk Kelurahan Benua Melayu Laut sebanyak 6,00 m<sup>3</sup>/hari. Dengan melihat volume sampah di Kelurahan Benua Melayu Laut perhari dan jumlah penduduk sebanyak 10.431 jiwa dapat di asumsikan bahwa satu orang menghasilkan 0,00057 m<sup>3</sup>/hari.

Berdasarkan hasil pre survey, peneliti mendapatkan bahwa sampah pada pukul 6 pagi sudah bersih dan dibawa seluruhnya ke TPA. Sampah kembali menumpuk pada pukul 9 pagi. Padahal di TPS sudah di pasang papan pengumuman yang berisikan waktu jadwal pembuangan sampah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak pada tahun 2011 terdapat 52 orang yang tertangkap membuang sampah tidak sesuai jadwalnya. Tahun 2012 mengalami penurunan yaitu berjumlah 37 orang dan pada tahun 2013 sebanyak 32 masyarakat

yang tertangkap membuang sampah diluar jam yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 pada pasal 45 ditegaskan bahwa pelanggaran terhadap seluruh ketentuan pasal diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Untuk Kelurahan Benua Melayu Laut sendiri masih banyak tumpukan sampah di TPS di siang hari. Ini berarti masih ada pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Melihat hal tersebut, peneliti ingin menggali informasi mengenai implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penertiban membuang sampah di Kelurahan Benua Melayu Laut. Peneliti akan lebih menekankan kepada penertiban pembuangan sampah. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti akan mengambil judul "Implementasi Kebijakan Penertiban Pembuangan Sampah di Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak."

## 2. Fokus Penelitian

Pelaksanaan kebijakan pemerintah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik seperti yang sudah di jelaskan pada latar belakang diatas. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor apa yang menyebabkan kebijakan penertiban pembuangan sampah belum berjalan dengan efektif.

## 3. Rumusan Permasalahan

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian ini maka dibuatlah sebuah rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu : "Faktor-

faktor apa yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Penertiban Pembuangan Sampah di Kelurahan Benua Melayu Laut Belum Efektif?"

## 4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban pembuangan sampah di Kelurahan Benua Melayu Laut belum efektif.

## 5. Manfaat Penelitian

### A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pemerintahan terutama aspek kebijakan publik. Serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kebijakan publik.

### B. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Pontianak dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan pembuangan sampah di Kota Pontianak. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat dalam menjalani suatu kebijakan.

## B. Kerangka Teori dan Metodologi

### 1. Implementasi Kebijakan

Seperti yang telah diketahui, implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang diharapkan sebelumnya. Untuk itu kebijakan wajib untuk diimplementasikan agar segala tujuan dapat tercapai.

Kebijakan yang sudah dirumuskan oleh aktor kebijakan, perlu diimplementasikan

untuk mencapai sasaran dari kebijakan tersebut. Menurut Sunggono (1994:137) “implementasi kebijakan merupakan keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Kebijakan publik yang ditetapkan untuk dilaksanakan hendaknya selalu mengandung tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut.”

Model yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan ini ialah Model implementasi Edward III dalam buku Subarsono (2006:90), implementasi atau pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target Group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini yaitu transmisi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi.
2. Sumber Daya, Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi pelaksana atau implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk pelaksanaan program agar efektif, dimana tanpa sumberdaya maka program atau kebijakan hanya sekedar kertas dokumen. Sumber daya meliputi empat komponen, yaitu ;
  - a. Staf (*staff*)

- b. Informasi (*Information*) yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan
  - c. Kewenangan (*authority*) tugas dan tanggung jawab
  - d. Fasilitas (*Facilities*) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
3. Disposisi, Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.
  4. Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian

laporan. Aspek struktur birokrasi meliputi dua hal yaitu *Standart Operasional Procedure (SOP)* dan struktur birokrasi itu sendiri.

## 2. Metode Penelitian

penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian Deskriptif, Deskriptif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendiskripsikan sebuah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, sehingga peneliti dapat menjelaskan secara benar sesuai dengan data dan fakta yang ada dilapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari beberapa tahapan yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*. Lokasi penelitian ialah Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Subjek penelitian ialah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Kepala Bidang Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Kepala Seksi Angkutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Petugas yang bertugas mengangkut sampah dari TPS Kelurahan Benua Melayu Laut ke TPA sebanyak 2 orang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Lurah Benua Melayu Laut, Ketua RT dan RW di Kelurahan Benua melayu Laut masing-masing sebanyak 2 orang, Masyarakat Kelurahan Benua Melayu laut sebanyak 4 orang.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kota Pontianak dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2006 tentang jadwal pembuangan sampah telah dilaksanakan sejak kebijakan itu dikeluarkan, hanya saja masih ada kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang peraturan tersebut. Oleh karena itu implementasi kebijakan dalam penertiban pembuangan sampah belum berjalan dengan efektif.

Implementasi kebijakan merupakan proses kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Implementasi kebijakan lebih menekankan pada tataran pelaksana atau aksi dari kebijakan setelah ditetapkan oleh pemerintah. Keberhasilan suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan.

Kebijakan publik akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat apabila aparat pelaksanaannya mempunyai kemampuan memahami tuntutan masyarakat, tidak kaku dalam memahami prosedur dan aturan-aturan formal, mengedepankan kepentingan masyarakat, peka terhadap ketidakadilan dan ketidakpuasan masyarakat, dan dalam setiap langkah dan tindakannya berusaha melakukan penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. Beberapa faktor disinyalir memiliki peran penting dalam keberhasilan proses implementasi kebijakan dalam penertiban pembuangan sampah di Kelurahan Benua Melayu Laut. Berdasarkan model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, peneliti akan membahas empat variabel dan mengaitkan dengan hasil penelitian yang didapatkan selama di lapangan. Keempat variabel tersebut dapat dijelaskan atau diuraikan sebagai berikut :

### 1. Komunikasi

Faktor pertama yang berpengaruh menurut Edward III adalah faktor komunikasi. Komunikasi dalam hal ini diartikan sebagai proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. Sumber informasi yang berbeda akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implemementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Komunikasi memiliki tiga indikator yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

a. Transmisi

Keberhasilan dari implementasi kebijakan dapat dilihat dari adanya penyampaian informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan sasaran, dengan begitu informasi dari aparaturnya akan sampai dengan baik kepada seluruh masyarakat. Penyampaian informasi terkadang tidak selalu berjalan dengan baik karena dalam penyampaian informasi ini seringkali terjadi masalah dalam penyampaian informasi yaitu adanya salah pengertian atau kesalahpahaman yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses penyampaian informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak mengenai penyampaian informasi ini, peneliti menilai sudah dilakukan dengan maksimal. Hal itu ditunjukkan dengan sering dilakukannya sosialisasi baik itu bertemu langsung maupun melalui papan pengumuman yang di pasang di setiap TPS. Kepala Bidang Operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak juga mengatakan hal yang senada. Sosialisasi telah dilakukan sejak peraturan itu dikeluarkan hingga sekarang.

Peneliti juga mewawancarai Lurah dan Ketua RT di Kelurahan Benua Melayu Laut. Berdasarkan wawancara peneliti mendapatkan sosialisasi sudah sering dilakukan dan masyarakat juga sudah banyak yang mengetahui akan peraturan itu. Tapi menurut Ketua RT 3 RW 3 yang peneliti wawancarai mengatakan itu kembali kepada pribadi masing-masing apakah akan ikut peraturan atau akan mengabaikannya, karena pihak Kelurahan maupun RT sendiri sudah berusaha mensosialisasikan juga peraturan tersebut.

b. Kejelasan Informasi

Dalam hal kejelasan mengenai penertiban pembuangan sampah di Kota Pontianak telah tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2006 tentang jadwal pembuangan sampah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum. Tentu saja dengan menyesuaikan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pada umumnya dalam pengelolaan sampah di setiap daerah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab, kewenangan Pemerintah Daerah dan peran masyarakat serta dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, peneliti mendapatkan bahwa semua informasi yang diberikan sudah jelas tercantum dalam perwa nomor 6 tahun 2006. Peneliti juga berhasil mewawancarai masyarakat yang sedang membuang sampah tidak sesuai dengan jadwal, dengan

memberikan alasan bahwa Ia kepasar sekalian membuang sampah padahal sudah tahu pada saat itu tidak sesuai jadwalnya. Masyarakat yang ditemui peneliti di rumah juga mengatakan bahwa sudah sering ada sosialisasi yang diberikan.

### c. Konsistensi Informasi

Konsistensi dalam penyampaian informasi harus dimiliki oleh setiap implementor. Untuk implementasi kebijakan penertiban pembuangan sampah di Kelurahan Benua Melayu Laut, pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak dan pihak Kelurahan Benua Melayu Laut sudah melakukan konsistensi informasi yang baik. Pihak dinas dan kelurahan sudah memiliki kesepakatan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Lurah Benua Melayu Laut didapatkan bahwa sosialisasi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan awal dan selalu dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

### 2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam proses implementasi. Untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, sumber-sumber kebijakan layak mendapatkan perhatian yang sehingga dapat mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Komponen sumber daya meliputi staf yang memadai, informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan tugas dan tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

#### a. Staf

Jumlah staf yang memadai dan memiliki kualitas dan kuantitas dibidangnya merupakan sumber daya yang penting dalam implementasi atau pelaksanaan program.

Staf atau aparatur harus cukup baik secara jumlah maupun cakap dalam mengerjakan tugasnya. Efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumberdaya aparatur yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Walaupun aturan main pelaksanaan kebijakan telah di transformasikan dengan tepat, tetapi sumber daya manusia terbatas baik dari jumlah maupun keahlian maka pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas dan Kepala Bidang Operasional Kebersihan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak didapatkan bahwa jumlah staf di Dinas sudah memadai hanya saja ada kekurangan PHL untuk menjadi petugas penjaga TPS.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti juga didapatkan bahwa petugas penjaga TPS tidak disiplin dalam bekerja. Petugas yang seharusnya bertugas dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB ini tidak berada ditempat pada jam kerja mereka. Hal ini terjadi karena sistem rolling yang digunakan dalam menjaga TPS ini. Seharusnya dengan jumlah TPS yang harus dijaga sebanyak 118 petugas juga dengan jumlah yang sama. Namun, saat ini hanya ada 29 petugas penjaga TPS yang dimiliki. Sehingga pada sistem rolling yang dilakukan masih belum efektif. Hal ini juga yang membuat warga tidak takut untuk membuang sampah tidak sesuai jadwal yang telah ada.

#### b. Informasi

Informasi merupakan sumber daya yang tak kalah penting bagi pelaksana kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang.

Pada informasi peneliti tidak menemukan hal yang bermasalah. Informasi seperti Undang-undang dan peraturan-peraturan telah dimiliki oleh implementor dan sudah mengetahui kebijakan apa yang akan dilakukan. Begitu juga informasi yang disampaikan kepada masyarakat, sudah sesuai dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak juga mengatakan mereka sudah melaksanakan sesuai dengan tugas masing-masing sesuai dengan Undang-undang yang sudah mengaturnya.

c. Kewenangan Tugas dan Tanggung jawab

Sumber daya yang juga penting adalah kewenangan tugas dan tanggung jawab untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Kewenangan akan membawa pengaruh terhadap lembaga dalam menjalankan kebijakan. Kewenangan harus bersifat formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi karena dipandang oleh publik implementor tersebut tidak berkompeten.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menemukan implemetor yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak Serta Lurah Benua Melayu Laut telah menjalankan tugas pengendalian, pengawasan, penyelenggaraan, pembinaan ketertiban umum sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2006.

d. Fasilitas

Sumber daya yang terakhir adalah fasilitas, fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas yang memadai untuk melakukan koordinasi maka besar kemungkinan pelaksanaan program yang direncanakan tidak akan berhasil dengan efektif.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak didapatkan bahwa fasilitas Dinas Kebersihan dan Pertamanan saat ini masih mengalami kekurangan yaitu pada armada pengangkut sampah, TPS dan TPA. Saat ini jumlah armada berjumlah 35 buah yang terdiri dari arm roll truck, dump truck, pick up, tosa dan compactor truck.

Petugas pengangkut sampah dari TPS Kelurahan Benua Melayu Laut ke TPA juga mengatakan bahwa fasilitas armada yang dimiliki masih kurang sehingga Ia harus dua kali bolak balik ke TPS dan TPA agar sampah dapat terangkut semua. Selain armada yang kurang menurut warga Benua Melayu Laut TPS di daerahnya juga masih kurang layak hingga saat ini.

### 3. Disposisi

Edward III (dalam Subarsono, 2010 : 91) menyebutkan bahwa "disposisi adalah watak dan karekteristik yang dimiliki implementor dalam menjalankan sebuah kebijakan." Perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan adalah kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada pada program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana

kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pelaksanaan implementasi kebijakan dalam penertiban pembuangan sampah, keseriusan sikap implementor dirasakan sedikit kurang serius. Hal tersebut dirasakan dengan kurangnya keseriusan dari implementor yang bertugas menjaga TPS khususnya TPS di Benua Melayu Laut. Seharusnya, petugas penjaga TPS bertugas dari pukul 7 pagi hingga pukul 3 sore setiap harinya. Hal ini dikatakan oleh masyarakat, salah satu RT di Kelurahan Benua Melayu laut serta Kepala Bidang Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak juga mengatakan hal ini terjadi karena kekurangan pegawai dan harus menggunakan sistem rolling.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa semua pegawai sudah melaksanakan tupoksinya masing-masing. Namun pada petugas penjaga TPS pelaksanaannya kurang maksimal dikarenakan petugas tidak betul-betul ada bertugas pada jam-jam tugasnya. Sehingga saat ada warga yang membuang sampah tidak pada jadwalnya tidak bisa ditangkap untuk diproses selanjutnya oleh pengadilan. Walaupun sudah banyak yang tertangkap karena telah melakukan pelanggaran tetap saja masih ada warga yang tidak tertangkap karena petugas yang tidak berada ditempat.

Seperti data yang diperoleh oleh peneliti yaitu sampai pada Bulan September 2014 sudah ada 23 orang yang tertangkap. Meskipun sudah ada data warga yang tertangkap tapi tetap masih ada warga yang tidak tertangkap dan itu terbukti dengan

peneliti menemukan warga yang sedang membuang sampah tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama mekanisme, Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operation procedur* (SOP). Aspek kedua struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang lemah bahkan selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

##### a. Standart Operational Procedure (SOP)

Bagian yang terpenting dalam organisasi kebijakan adalah adanya SOP. Kegunaan SOP merupakan suatu pedoman tertulis yang dipergunakan untuk menggerakkan pelaksana dalam pembagian tugas agar organisasi yang dijalankan efektif sehingga tujuan yang ditetapkan dapat terealisasi. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak sudah memiliki SOP dalam kegiatan penyuluhan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas dan Kepala Bidang Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak didapatkan bahwa semua tugas yang dilaksanakan sudah sesuai dengan SOP yang ada.

##### b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas dan fungsi dialokasikan dalam organisasi. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan

terhadap cara setiap individu melaksanakan tugasnya dalam organisasi.

Masalah persampahan di Kota Pontianak dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak. Tidak hanya itu, pihak kelurahan, RT dan masyarakat pun berperan dalam mengatasi masalah persampahan ini. Tidak hanya pengendalian, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak juga memiliki tugas pengawasan, penyelenggaraa, dan pembinaan.

Struktur organisasi dalam hal mengatasi masalah persampahan ini tidaklah berbelit-belit. Tidak terjadi saling tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dinas karena setiap bidang telah memiliki tugas masing-masing.

#### D. SIMPULAN

Berbagai pemaparan tentang implementasi kebijakan dalam penertiban pembuangan sampah di Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak telah peneliti jabarkan di atas, setelah peneliti analisis dengan menggunakan teori yang ada, dapat ditarik beberapa simpulan yaitu:

1. Komunikasi, memiliki tiga indikator yaitu transmisi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi. Ketiganya sudah dilaksanakan dengan baik, hanya saja masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk membuang sampah sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. Sumber Daya, terdiri dari empat komponen yaitu staf, informasi, kewenangan dan fasilitas. Dalam implementasi ini terdapat masalah pada komponen staf dan fasilitas. Staf yaitu petugas penjaga TPS yang masih kurang, fasilitas yaitu armada pengangkut sampah yang kurang

serta TPS dan TPA yang kurang layak.

3. Disposisi, masih ada masalah pada sikap petugas penjaga TPS. Petugas penjaga TPS tidak melaksanakan tugasnya dengan baik karena sering meninggalkan tempat pada saat jam kerja.
4. Struktur Birokrasi, sudah berjalan dengan baik. Implementasi sudah memiliki SOP dan sudah dilaksanakan sesuai SOP. Struktur organisasinya pun tidak berbelit-belit.

#### E. SARAN

Setelah mengemukakan beberapa hal yang menjadi simpulan dalam tulisan ini, berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam mengambil keputusan dan mengimplementasikan kebijakan dalam penertiban pembuangan sampah, sebagai berikut :

1. Komunikasi, sosialisasi harus lebih giat lagi dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak. Sosialisasi juga harus tepat sasaran agar dapat dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda antara penerima informasi.
2. Sumber Daya, perlunya tambahan petugas penjaga TPS sesuai dengan jumlah TPS sehingga tidak perlu ada sistem *rolling* lagi. Dan perlu penambahan fasilitas armada pengangkut sampah, serta perbaikan fasilitas TPS dan TPA agar semua sampah dapat tertampung dan dikelola dengan baik.
3. Disposisi, bagi petugas yang tidak melaksanakan tugas dengan baik bisa

diberikan tindakan yang tegas agar dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik lagi.

4. Struktur Birokrasi, dipertahankan agar selalu baik dan selalu dipandu dengan SOP dalam setiap pelaksanaan kegiatannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. REFERENSI BUKU

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Moeloeng, Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Muhadjir, Noeng. 2002. *Metode Penelitian kualitatif. Edisi IV*. Yogyakarta : Rakha Sarasin.
- Narbuko, Cholid., Abu Achmadi. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Satori. Djam'an., Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik:Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- , 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- , 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- , 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparmoko. 2000. *Ekonomika Lingkungan. Edisi I*. Yogyakarta : BPFE.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI – Puslit KP2W LemLit Unpad.
- Tohardi, Ahmad. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Pontianak : Prodi IP FISIP Untan.
- Wahab, Solichin Abdul. 2006. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.
- , Joko. 2005. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

[I,1-13-evi-FH.pdf](#). (diakses pada 20 Januari 2014).

## B. SKRIPSI-SKRIPSI

Wardani, Hesti ayu. 2012. *Pengaruh Komunikasi Terhadap Efektivitas Implementasi Kebijakan Tertib Kebersihan di Kecamatan Pontianak Kota*. Universitas Tanjungpura.

Timwarta. 2012. *Ketersediaan Kontainer Sampah di Kota Pontianak Masih Belum memadai*, melalui <http://www.volarefm.com/2012/06/ketersediaan-kontainer-sampah-di-kota-pontianak-masih-belum-memadai/> (diakses pada tanggal 1 Maret 2014).

Wahyudi. 2012. *Implementasi Manajemen Persampahan di Kota Pontianak*. Universitas Tanjungpura.

## C. PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah NO. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Jadwal Pembuangan Sampah.

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak

## D. SUMBER DARI INTERNET

Permata Sari, Evi. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 di Kota Bengkulu Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah*, Universitas Bengkulu. Melalui <http://repository.unib.ac.id/858/3/I.II.II>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
**PENGELOLA JURNAL MAHASISWA**

Jalan A Yani Pontianak, KodePos 78124  
Homepage <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL/ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : CITRA RATNA SARI  
NIM / Periode lulus : E42010009 / 2014  
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU PEMERINTAHAN  
Email address / HP : citra.ratnasari18@yahoo.com / 085753211996

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exlusife Royalti-Free Fighi*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEMBUANGAN SAMPAH DI  
KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA  
PONTIANAK**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- Fulltext  
 Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan scbenarnya.

Mengetahui/disetujui  
Pengelola-Jurnal..... / 21 Jan 15

Dibuat di : Pontianak  
Pada Tanggal : 19 November 2014



Dr. H. Wijaya Kusuma, MA  
NIP. 196202141986031001

Citra Ratna Sari